

ANALISIS TINGKAT  
KEMANDIRIAN DAN  
EFEKTIVITAS PENDAPATAN  
ASLI DAERAH PADA  
PEMERINTAH  
KOTA/KABUPATEN DI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2012 - 2016

*by* Andik Achmat Rossid

---

FILE	JURNAL_SKRIPSI_ANDIK_ACHMAT_ROSSID_-_221308435.DOCX (54.87K)		
TIME SUBMITTED	14-FEB-2018 08:15AM (UTC+0700)	WORD COUNT	2911
SUBMISSION ID	915648937	CHARACTER COUNT	18530

8  
**ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS  
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH  
KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012 - 2016**

Andik Achmat Rossid  
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
e-mail : [andik.achmat95@gmail.com](mailto:andik.achmat95@gmail.com)

5  
**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian dan efektivitas pendapatan asli daerah pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur tahun 2012 – 2016. Sampel dari penelitian ini adalah 38 Pemerintah Kota/Kabupaten. Data penelitian ini berasal dari laporan realisasi anggaran tahun 2012-2016 yang didapat dari website Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan adalah rasio kemandirian dan rasio efektivitas pendapatan asli daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dari analisis Rasio Kemandirian bisa dikatakan rendah sekali diketahui 33 Kota/Kabupaten berada pada rasio antara 0%-25% hal ini terjadi dikarenakan Pemerintah Daerah masih bergantung pada Pemerintah Pusat. Diketahui hanya Kota Surabaya yang telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah dengan rasio 180,84%. 4 Kota/Kabupaten lainnya diketahui rendah dan sedang yang memiliki rasio antara 25%-75%. Ditinjau dari Rasio Efektivitas PAD masih banyak yang dikatakan cukup efektif yang berarti Kota/Kabupaten belum bisa mencapai target PAD yang ditetapkan, diketahui terdapat 19 Kota/Kabupaten. Namun hampir setengahnya memiliki rasio sangat efektif, diketahui terdapat 16 Kota/Kabupaten menunjukkan bahwa pemerintah mampu merealisasikan melebihi target yang ditetapkan. 3 Kota/Kabupaten lainnya diketahui masih kurang efektif dan belum memaksimalkan potensi yang dimiliki daerah tersebut.

**Kata kunci :** Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas PAD

12  
This study aims to determine the level of independence and effectiveness of local revenues on Government City / Regency in East Java Province in 2012 - 2016. The sample of this research is 38 Municipal / District Government. This research data comes from the budget realization report of 2012-2016 obtained from the website of the Central Bureau of Statistics. The method of analysis used is the ratio of independence and the ratio of the effectiveness of local revenue. The results showed that: From the analysis of independence Ratio can be said very low known 33 City / District is in the ratio between 0% -25% this happens because the Regional Government is still dependent on the Central Government. It is known that only the city of Surabaya has been completely independent in implementing regional autonomy with a ratio of 180.84%. 4 Other cities / regencies are known to be low and medium with a ratio of between 25% -75%. Judging from the PAD Effectiveness Ratio is still a lot of which is said to be quite effective which means City / District has not been able to reach the target PAD set, known there are 19 cities / regencies. But almost half have a very effective ratio, it is known there are 16 cities / districts show that the government is able to realize beyond the target set.

3 Other cities / regencies are known to be less effective and have not maximized the potential of the area.

**Keywords:** Independence Ratio and Effectiveness Ratio of PAD

## PENDAHULUAN

Untuk menjamin terselenggaranya sistem otonomi di daerah dengan baik, maka kosekuensinya adalah diberlakukannya Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini sangat membuka kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah dalam mengurus daerahnya secara mandiri. (Halim, 2004).

Pengalaman menunjukkan bahwa hampir semua daerah persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil. Umumnya APBD suatu daerah di Indonesia didominasi oleh sumbangan Pemerintah Pusat dan Sumbangan Lain-lain yang diatur dalam Perundang-undangan. Hal ini menyebabkan daerah sangat tergantung pada Pemerintah Pusat, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi sangat terbatas.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Keuangan Daerah

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kewajiban daerah tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam ketentuan umum pada PP Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut

20  
pengurusan bendaharawan. Dalam pengelolaan anggaran/keuangan daerah harus mengikuti prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. APBD harus disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik, sebagai berikut: (a) Partisipasi Masyarakat, (b) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, (c) Disiplin Anggaran, (d) Keadilan Anggaran, (e) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dan (f) Taat Asas.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (PP 58/2005, pasal 1).

#### 11 **B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat pula didefinisikan sebagai sumber penerimaan yang penguasaan dan pengelolaannya diserahkan oleh negara kepada daerah otonom (Abdul Halim, 2007).

#### **C. Kemampuan Keuangan Daerah**

Suatu daerah yang otonom, harus mempunyai kemampuan keuangan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Daerah yang telah mandiri ditandai dengan berkurang ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat. Dengan demikian tujuan otonomi bisa terlaksana sesuai yang diharapkan. Meningkatkan PAD merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja rutin dan pembangunan. (Halim, 2004)

#### 5 **1. Rasio Kemandirian**

Rasio Kemandirian ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain antara lain: Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Pinjaman (Widodo, 2001).

<sup>7</sup> Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Abdul Halim, 2007). Rasio kemandirian dapat di rumuskan sebagai berikut:

$$RK = \frac{PAD}{\text{Bantuan PP/Propinsi dan Pinjaman}}$$

Pola hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah serta <sup>4</sup> tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat disajikan dalam matriks seperti Tabel berikut ini:

Tabel 1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: (Halim, 2004)

## <sup>1</sup> 2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut perlu dipersandingkan dengan <sup>4</sup> rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah (Mahmudi, 2010: 143). Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$RE = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasar Potensi Riil Daerah}}$$

Adapun kriteria untuk menetapkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan seperti dalam tabel berikut:

Tabel 2 Kriteria Penilaian Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2010)

#### METODE PENELITIAN

##### A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan data sekunder dari BPS kemudian diolah dan dianalisa dengan membandingkan teori-teori yang ada sehingga memperoleh analisa yang baik untuk mengambil sebuah kesimpulan.

##### B. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dalam bentuk angka antara lain data laporan Realisasi Anggaran seluruh Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang tercatat di BPS Jatim.

##### C. Populasi Dan Sampel

###### Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pemerintah daerah yang terdaftar di BPS. Terdapat 38 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, rinciannya sebagai berikut:

01. Kabupaten Pacitan

02. Kabupaten Ponorogo
03. Kabupaten Trenggalek
04. Kabupaten Tulungagung
05. Kabupaten Blitar
06. Kabupaten Kediri
07. Kabupaten Malang
08. Kabupaten Lumajang
09. Kabupaten Jember
10. Kabupaten Banyuwangi
11. Kabupaten Bondowoso
12. Kabupaten Situbondo
13. Kabupaten Probolinggo
14. Kabupaten Pasuruan
15. Kabupaten Sidoarjo
16. Kabupaten Mojokerto
17. Kabupaten Jombang
18. Kabupaten Nganjuk
19. Kabupaten Madiun
20. Kabupaten Magetan
21. Kabupaten Ngawi
22. Kabupaten Bojonegoro
23. Kabupaten Tuban
24. Kabupaten Lamongan

25. Kabupaten Gresik
26. Kabupaten Bangkalan
27. Kabupaten Sampang
28. Kabupaten Pamekasan
29. Kabupaten Sumenep
30. Kota Kediri
31. Kota Blitar
32. Kota Malang
33. Kota Probolinggo
34. Kota Pasuruan
35. Kota Mojokerto
36. Kota Madiun
37. Kota Surabaya
38. Kota Batu

#### **Sampel**

<sup>14</sup> Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan study pustaka.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<sup>1</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Rasio Tingkat Kemandirian dan Rasio Efektivitas PAD untuk menilai tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan pihak Pemerintah Pusat dan Provinsi, dan menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD. <sup>22</sup> Sampel penelitian ini



seluruh Kota dan Kabupaten yang ada di Jawa Timur. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota dan Kabupaten di Jawa Timur yang di dapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur.

No	Kabupaten/ Kota	Tahun					Rata- Rata	Keterangan
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	Kota Surabaya	102.27%	168.70%	177.62%	233.62%	221.96%	180.84%	Delegatif
2	Kab. Sidoarjo	50.51%	55.09%	64.77%	75.25%	56.59%	60.44%	Partisipatif
3	Kab. Gresik	36.77%	43.11%	57.51%	74.43%	62.47%	54.86%	Partisipatif
4	Kota Malang	22.43%	31.73%	35.74%	37.94%	37.86%	33.14%	Konsultatif
5	Kab. Mojokerto	12.47%	20.06%	29.56%	36.88%	28.29%	25.45%	Konsultatif
6	Kab. Jember	13.97%	18.22%	26.74%	27.27%	22.98%	21.84%	Instruktif
7	Kab. Pasuruan	14.55%	16.91%	23.39%	28.30%	23.18%	21.27%	Instruktif
8	Kota Kediri	17.81%	18.96%	18.53%	21.65%	24.11%	20.21%	Instruktif
9	Kab. Tuban	12.96%	18.76%	19.12%	23.79%	19.65%	18.86%	Instruktif
10	Kab. Jombang	12.30%	13.58%	18.02%	21.62%	19.53%	17.01%	Instruktif
11	Kota Mojokerto	13.34%	14.91%	16.25%	17.91%	19.94%	16.47%	Instruktif
12	Kota Probolinggo	13.89%	14.99%	15.08%	19.30%	18.87%	16.43%	Instruktif
13	Kab. Lamongan	10.97%	11.09%	14.85%	21.17%	21.61%	15.94%	Instruktif
14	Kota Blitar	14.79%	13.12%	16.13%	15.35%	16.48%	15.18%	Instruktif
15	Kab. Banyuwangi	10.23%	12.46%	15.11%	16.95%	20.89%	15.13%	Instruktif
16	Kab. Nganjuk	10.47%	10.94%	17.77%	20.20%	15.30%	14.94%	Instruktif
17	Kab. Malang	10.11%	11.50%	14.16%	17.58%	21.19%	14.91%	Instruktif
18	Kota Madiun	10.20%	10.59%	15.27%	18.78%	19.73%	14.91%	Instruktif
19	Kota Pasuruan	9.23%	12.73%	14.98%	17.12%	19.93%	14.80%	Instruktif
20	Kab. Kediri	7.42%	10.59%	14.64%	20.68%	19.50%	14.57%	Instruktif
21	Kab. Tulungagung	10.96%	10.69%	15.03%	16.56%	13.10%	13.27%	Instruktif
22	Kab. Lumajang	10.43%	11.33%	11.48%	15.23%	14.55%	12.60%	Instruktif
23	Kota Batu	8.24%	9.04%	12.22%	14.44%	17.75%	12.34%	Instruktif
24	Kab. Probolinggo	7.81%	8.65%	11.77%	16.13%	16.78%	12.23%	Instruktif
25	Kab. Bojonegoro	11.35%	13.35%	11.42%	12.26%	10.58%	11.79%	Instruktif

26	Kab. Ponorogo	8.53%	9.71%	11.75%	15.12%	13.22%	11.66%	Instruktif
27	Kab. Trenggalek	8.87%	9.44%	11.80%	12.16%	12.62%	10.98%	Instruktif
28	Kab. Blitar	7.88%	8.91%	11.80%	14.37%	11.28%	10.85%	Instruktif
29	Kab. Situbondo	7.80%	8.14%	11.02%	12.57%	15.29%	10.96%	Instruktif
30	Kab. Magetan	7.88%	8.64%	11.93%	12.55%	13.39%	10.88%	Instruktif
31	Kab. Madiun	7.75%	7.89%	11.06%	13.24%	10.95%	10.18%	Instruktif
32	Kab. Sumenep	6.75%	7.78%	9.56%	12.73%	11.54%	9.67%	Instruktif
33	Kab. Pamekasan	7.39%	7.72%	8.94%	11.97%	10.25%	9.26%	Instruktif
34	Kab. Bangkalan	7.22%	8.29%	9.41%	10.73%	10.43%	9.22%	Instruktif
35	Kab. Bondowoso	7.44%	7.70%	8.84%	12.20%	9.76%	9.19%	Instruktif
36	Kab. Sampang	7.00%	7.29%	8.39%	12.13%	10.28%	9.02%	Instruktif
37	Kab. Ngawi	5.63%	7.19%	9.28%	12.53%	10.02%	8.93%	Instruktif
38	Kab. Pacitan	6.57%	7.64%	8.34%	10.74%	9.21%	8.50%	Instruktif

1. Tingkat Kemandirian Kota/Kabupaten di Jawa Timur tahun 2012 – 2016 masih banyak yang memiliki hubungan instruktif yaitu terdapat 33 kota/kabupaten antara lain Kabupaten Pacitan 8,50%, Kabupaten Ponorogo 11,66%, Kabupaten trenggalek 10,98%, Kabupaten Tulungagung 13,27%, Kabupaten Blitar 10,85%, Kabupaten Kediri 14,57%, Kabupaten Malang 14,91%, Kabupaten Lumajang 12,60%, Kabupaten Jember 21,84%, Kabupaten Banyuwangi 15,13%, Kabupaten Bondowoso 9,19%, Kabupaten Situbondo 10,96%, Kabupaten Probolinggo 12,23%, Kabupaten Pasuruan 21,27%, Kabupaten Jombang 17,01%, Kabupaten Nganjuk 14,94%, Kabupaten Madiun 10,18%, Kabupaten Magetan 10,88%, Kabupaten Ngawi 8,93%, Kabupaten Bojonegoro 11,79%, Kabupaten Tuban 18,86%, Kabupaten Lamongan 15,94%, Kabupaten Bangkalan 9,22%, Kabupaten Sampang 9,02%, Kabupaten Pamekasan 9,26%, Kabupaten Sumenep 9,67%, Kota Kediri 20,21%, Kota Blitar 15,18%, Kota Probolinggo 16,43%, Kota Pasuruan 14,80%, Kota Mojokerto 16,47%, Kota Madiun 14,91%, dan Kota Batu 12,34% bisa dikatakan rendah sekali yang berarti bahwa peran

Pemerintah Pusat dan Provinsi lebih dominan. Kabupaten Mojokerto dan Kota Malang mempunyai rasio kemandirian 25,45% dan 33,14% dapat dikatakan rendah dan memiliki hubungan konsultatif yang berarti campur tangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sudah mulai berkurang. Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo mempunyai rasio kemandirian 54,86% dan 60,44% dapat dikatakan sedang dan memiliki hubungan partisipatif yang berarti peran Pemerintah Pusat dan Provinsi semakin berkurang. Kota Surabaya mempunyai rasio kemandirian 180,84% dapat dikatakan tinggi dan memiliki hubungan delegatif yang berarti campur tangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sudah tidak ada, karena Kota Surabaya telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

9 No	Kabupaten/ Kota	Tahun					Rata- Rata	Keterangan
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	Kab. Jember	115.77%	113.42%	149.47%	220.74%	105.02%	140.88%	Sangat Efektif
2	Kab. Gresik	118.71%	98.98%	126.59%	120.21%	115.64%	116.03%	Sangat Efektif
3	Kab. Tulungagung	234.16%	75.05%	104.27%	77.26%	77.66%	113.68%	Sangat Efektif
4	Kab. Mojokerto	98.50%	113.88%	138.19%	111.76%	100.19%	112.50%	Sangat Efektif
5	Kab. Trenggalek	106.65%	115.34%	140.34%	93.34%	91.60%	109.45%	Sangat Efektif
6	Kab. Sumenep	120.44%	106.13%	119.01%	102.64%	97.88%	109.22%	Sangat Efektif
7	Kota Surabaya	112.04%	112.75%	105.82%	108.40%	95.14%	106.83%	Sangat Efektif
8	Kab. Sidoarjo	123.42%	107.79%	107.14%	97.78%	94.60%	106.15%	Sangat Efektif
9	Kab. Situbondo	92.34%	100.67%	130.31%	97.16%	110.17%	106.13%	Sangat Efektif
10	Kab. Madiun	99.48%	96.27%	120.42%	106.51%	101.21%	104.78%	Sangat Efektif
11	Kota Batu	104.14%	101.17%	100.28%	103.65%	113.92%	104.63%	Sangat Efektif
12	Kab. Banyuwangi	111.05%	115.43%	114.01%	87.85%	88.52%	103.37%	Sangat Efektif
13	Kab. Sampang	111.31%	103.24%	116.99%	98.59%	84.88%	103.00%	Sangat Efektif
14	Kota Mojokerto	113.97%	113.52%	97.73%	102.85%	85.51%	102.72%	Sangat Efektif
15	Kab. Lamongan	109.10%	96.38%	111.05%	97.93%	98.59%	102.61%	Sangat Efektif
16	Kab. Blitar	101.11%	99.78%	116.78%	93.70%	90.11%	100.30%	Sangat Efektif

17	Kab. Probolinggo	93.73%	96.13%	117.91%	94.29%	97.31%	99.87%	Cukup Efektif
18	Kab. Magetan	99.07%	94.97%	128.34%	87.02%	88.60%	99.60%	Cukup Efektif
19	Kab. Pasuruan	105.66%	102.02%	106.67%	88.38%	94.60%	99.47%	Cukup Efektif
20	Kab. Bangkalan	96.61%	103.73%	109.05%	89.91%	94.51%	98.76%	Cukup Efektif
21	Kab. Ponorogo	117.36%	89.65%	95.54%	89.19%	100.96%	98.54%	Cukup Efektif
22	Kota Malang	94.71%	114.33%	105.79%	86.89%	89.39%	98.22%	Cukup Efektif
23	Kota Pasuruan	73.44%	121.19%	105.85%	93.13%	96.28%	97.98%	Cukup Efektif
24	Kab. Lumajang	103.22%	106.04%	104.34%	87.72%	83.36%	96.94%	Cukup Efektif
25	Kab. Ngawi	83.92%	117.24%	115.63%	82.00%	84.70%	96.70%	Cukup Efektif
26	Kab. Nganjuk	104.37%	94.31%	131.29%	92.81%	56.90%	95.94%	Cukup Efektif
27	Kota Probolinggo	105.17%	106.15%	103.05%	80.42%	82.71%	95.50%	Cukup Efektif
28	Kab. Pacitan	93.05%	99.78%	106.96%	88.34%	86.89%	95.00%	Cukup Efektif
29	Kab. Bojonegoro	82.45%	123.06%	90.86%	90.29%	86.13%	94.56%	Cukup Efektif
30	Kab. Kediri	85.77%	98.27%	97.60%	93.48%	92.87%	93.60%	Cukup Efektif
31	Kota Blitar	104.61%	88.60%	103.43%	80.44%	89.52%	93.32%	Cukup Efektif
32	Kab. Jombang	94.16%	87.56%	111.17%	84.23%	85.04%	92.43%	Cukup Efektif
33	Kab. Bondowoso	86.48%	87.07%	106.65%	90.71%	87.00%	91.58%	Cukup Efektif
34	Kota Kediri	86.37%	103.63%	95.09%	80.44%	86.39%	90.38%	Cukup Efektif
35	Kab. Tuban	87.33%	96.32%	90.34%	89.65%	86.83%	90.09%	Cukup Efektif
36	Kab. Malang	89.51%	97.41%	97.93%	81.03%	63.09%	85.80%	Kurang Efektif
37	Kab. Pamekasan	79.04%	81.27%	93.69%	72.95%	83.86%	82.16%	Kurang Efektif
38	Kota Madiun	75.94%	77.31%	89.26%	82.76%	80.42%	81.14%	Kurang Efektif

2. Efektivitas PAD Kota/Kabupaten di Jawa Timur tahun 2012 – 2016 masih di dominasi dengan kriteria cukup efektif terdapat 19 Kota/Kabupaten yaitu Kabupaten Pacitan 95,00%, Kabupaten Ponorogo 98,54%, Kabupaten Kediri 93,60%, Kabupaten Lumajang 96,94%, Kabupaten Bondowoso 91,58%, Kabupaten Probolinggo, 99,87%, Kabupaten Pasuruan 99,47%, Kabupaten Jombang 92,43%, Kabupaten Nganjuk 95,94%, Kabupaten Magetan 99,60%,

Kabupaten Ngawi 96,70%, Kabupaten Bojonegoro 94,56%, Kabupaten Tuban 90,09%, Kabupaten Bangkalan 98,76%, Kota Kediri 90,38%, Kota Blitar 93,32%, Kota Malang 98,22%, Kota Probolinggo 95,50%, dan Kota Pasuruan 97,98% yang menunjukkan bahwa Kota/Kabupaten belum bisa merealisasikan PAD sesuai apa yang telah ditargetkan. Terdapat 16 Kota/Kabupaten yang termasuk dalam kriteria sangat efektif yaitu Kabupaten Trenggalek 109,45%, Kabupaten Tulungagung 113,68%, Kabupaten Blitar 100,30%, Kabupaten Jember 140,88%, Kabupaten Banyuwangi 103,37%, Kabupaten Situbondo 106,13%, Kabupaten Sidoarjo 106,15%, Kabupaten Mojokerto 112,50%, Kabupaten Madiun 104,78%, Kabupaten Lamongan 102,61%, Kabupaten Gresik 116,03%, Kabupaten Sampang 103,00%, Kabupaten Sumenep 109,22%, Kota Mojokerto 102,72%, Kota Surabaya 106,83%, dan Kota Batu 104,63% yang menunjukkan bahwa Kota/Kabupaten mampu merealisasikan PAD sesuai apa yang telah ditargetkan, bahkan dapat melebihi target. Kabupaten Malang, Kabupaten Pamekasan, dan Kota Madiun mempunyai rasio efektivitas pendapatan daerah 85,80%, 82,16%, dan 81,14% dapat dikatakan kurang efektif yang menunjukkan bahwa Kota dan Kabupaten tidak memaksimalkan pemanfaatan potensi-potensi yang dimiliki.

## **SIMPULAN & SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa :

1. Tingkat kemandirian Kota/Kabupaten di Jawa Timur tahun 2012-2016 bisa dikatakan rendah sekali diketahui 33 Kota/Kabupaten berada pada rasio antara 0%-25% hal ini terjadi dikarenakan Pemerintah Daerah masih bergantung pada Pemerintah Pusat. Diketahui hanya Kota Surabaya yang telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah dengan rasio 180,84%. 4 Kota/Kabupaten lainnya diketahui rendah dan sedang yang memiliki rasio antara 25%-75%.
2. Efektivitas PAD Kota/Kabupaten di Jawa Timur tahun 2012-2016 masih banyak yang dikatakan cukup efektif yang berarti Kota/Kabupaten belum bisa

mencapai target PAD yang ditetapkan, diketahui terdapat 19 Kota/Kabupaten. Namun hampir setengahnya memiliki rasio sangat efektif, diketahui terdapat 16 Kota/Kabupaten menunjukkan bahwa pemerintah mampu merealisasikan melebihi target yang ditetapkan. 3 Kota/Kabupaten lainnya diketahui masih kurang efektif dan belum memaksimalkan potensi yang dimiliki daerah tersebut.

### **Saran**

<sup>28</sup> Dari hasil analisis dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran untuk dijadikan bahan pertimbangan berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut :  
Sebaiknya dilakukan analisis terhadap LRA secara terus menerus, sehingga Pemerintah Kota/Kabupaten dapat mengetahui perkembangan daerahnya masing-masing. Pemerintah Kota/Kabupaten lebih memaksimalkan dalam menggali potensi sumber-sumber PAD untuk meningkatkan penerimaan, serta benar-benar memanfaatkan yang ada maupun yang belum diolah sehingga ketergantungan pada Pemerintah Pusat dapat diminimalisir dan target yang ditetapkan dapat direalisasikan bahkan melebihi.

# ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012 - 2016

## ORIGINALITY REPORT

**%26**  
SIMILARITY INDEX

**%25**  
INTERNET SOURCES

**%4**  
PUBLICATIONS

**%18**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>eprints.ung.ac.id</b> Internet Source	<b>%4</b>
<b>2</b>	<b>eprints.upnjatim.ac.id</b> Internet Source	<b>%3</b>
<b>3</b>	<b>omdhe.multiply.com</b> Internet Source	<b>%3</b>
<b>4</b>	<b>eprints.uny.ac.id</b> Internet Source	<b>%2</b>
<b>5</b>	<b>ejournal.unsrat.ac.id</b> Internet Source	<b>%2</b>
<b>6</b>	<b>a-research.upi.edu</b> Internet Source	<b>%1</b>
<b>7</b>	<b>repository.uksw.edu</b> Internet Source	<b>%1</b>
<b>8</b>	<b>Submitted to Politeknik Negeri Bandung</b> Student Paper	<b>%1</b>

---

9	Submitted to Udayana University Student Paper	% 1
10	<a href="http://ojs.unud.ac.id">ojs.unud.ac.id</a> Internet Source	% 1
11	<a href="http://repository.widyatama.ac.id">repository.widyatama.ac.id</a> Internet Source	% 1
12	<a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	% 1
13	<a href="http://eprints.umsida.ac.id">eprints.umsida.ac.id</a> Internet Source	% 1
14	Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper	% 1
15	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	% 1
16	<a href="http://ejournal.umm.ac.id">ejournal.umm.ac.id</a> Internet Source	% 1
17	<a href="http://studentjournal.petra.ac.id">studentjournal.petra.ac.id</a> Internet Source	<% 1
18	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	<% 1
19	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	<% 1
20	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a>	

---



Internet Source

<% 1

21

[priyohari.files.wordpress.com](http://priyohari.files.wordpress.com)

Internet Source

<% 1

22

[pt.scribd.com](http://pt.scribd.com)

Internet Source

<% 1

23

[ejournal.ekonomiuntagsmg.ac.id](http://ejournal.ekonomiuntagsmg.ac.id)

Internet Source

<% 1

24

[ism-patriot-surabaya.blogspot.com](http://ism-patriot-surabaya.blogspot.com)

Internet Source

<% 1

25

[etheses.uin-malang.ac.id](http://etheses.uin-malang.ac.id)

Internet Source

<% 1

26

[ejournal.undiksha.ac.id](http://ejournal.undiksha.ac.id)

Internet Source

<% 1

27

[repository.its.ac.id](http://repository.its.ac.id)

Internet Source

<% 1

28

[www.pekerjadata.com](http://www.pekerjadata.com)

Internet Source

<% 1

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE  
BIBLIOGRAPHY OFF